

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa praktik ADIZ berawal dari upaya negara dalam melindungi dirinya dari serangan udara pada situasi konflik bersenjata. Hal ini dikarenakan ADIZ memiliki fungsi untuk melakukan identifikasi terhadap lawan dan memberikan peringatan dini sehingga dapat melindungi negara dari ancaman serangan udara. Adanya kebutuhan negara untuk melindungi diri dari ancaman serangan udara menyebabkan munculnya praktik pembentukan ADIZ oleh negara-negara.

Praktik pembentukan ADIZ oleh negara tersebut tidak dilarang oleh hukum internasional. Konvensi Chicago 1944 serta UNCLOS 1982 memberikan peluang bagi negara untuk membentuk ADIZ apabila negara merasa memerlukan ADIZ untuk kepentingan keamanan negaranya. Selain itu Piagam PBB juga memberikan hak bagi negara untuk membela diri atas ancaman yang salah satunya dapat diimplementasikan dalam bentuk ADIZ. Meskipun hukum internasional memberikan peluang untuk membentuk ADIZ, namun tetap perlu memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional.

Indonesia sendiri pada dasarnya sudah tidak lagi asing dengan isu mengenai ADIZ. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kebutuhan untuk memiliki ADIZ mengingat banyaknya kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia yang dilakukan oleh penerbangan gelap (*black flight*) sehingga menimbulkan ancaman bagi wilayah udara Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Indonesia telah beberapa kali memiliki wacana pembentukan ADIZ yakni di tahun 1960, 2006, 2010, dan 2018 yang ditandai dengan dikeluarkannya PP Pamwilud. Saat ini PP Pamwilud hanya sebatas menjadi dasar hukum pembentukan ADIZ di Indonesia sekaligus menjadi pernyataan politik Indonesia untuk membentuk ADIZ demi menjaga keamanan wilayah udara. PP Pamwilud sendiri tidak memberikan ketentuan yang bersifat menetapkan ADIZ Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa ADIZ Indonesia yang didasarkan pada PP Pamwilud tersebut masih berupa wacana.

Meskipun sudah terdapat ketentuan yang dapat menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membentuk ADIZ, wacana pembentukan ADIZ Indonesia itu sendiri masih memiliki kelemahan baik dari sisi hukum maupun non-hukum. Dari sisi hukum terdapatnya beberapa ketentuan yang perlu di harmonisasikan dengan hukum internasional yang berlaku. Sementara itu, dari sisi non-hukum Indonesia memiliki keterbatasan dari segi kemampuan alutsista, khususnya kemampuan radar. Adanya kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan ADIZ Indonesia tidak dapat diimplementasikan secara efektif dan berpotensi untuk menuai protes dari negara lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gagasan untuk membentuk ADIZ sebagaimana diatur dalam PP Pamwilud tidak melanggar ketentuan hukum internasional. Namun, terdapat keperluan untuk melakukan peninjauan dan harmonisasi lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan ADIZ antara PP Pamwilud dengan batasan-batasan dalam hukum internasional, khususnya ketentuan mengenai letak ADIZ dan ketentuan prosedural. Selain itu, pembentukan ADIZ Indonesia juga perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan radar Indonesia agar dapat melakukan deteksi secara efektif demi menjaga keamanan wilayah udara sebagaimana tujuan dari pembentukan ADIZ Indonesia.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan, maka rekomendasi yang dapat diberikan bagi Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan revisi atas PP Pamwilud untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan ADIZ Indonesia dengan hukum udara internasional yang berlaku;
- 2) Menetapkan letak ADIZ Indonesia secara spesifik dalam revisi PP Pamwilud;
- 3) Menambahkan alasan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil menjadi salah satu pertimbangan pembentukan ADIZ;
- 4) Peningkatan kemampuan radar Indonesia, baik radar militer maupun radar sipil agar ADIZ Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Zimmermann, Christian Tomuschat, dan Karin Oellers-Frahm eds., *The Statute of the International Court of Justice*, Oxford University Press, 2006.
- Bin Chen, *The Law of International Air Transport*, Oceana Publications, 1962.
- C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, 2006.
- Detlef Berghorn & Markus Hattstein, *Essential Visual History of the World*, National Geographic Society, 2007.
- Elmar M. Giemulla dan Ludwig Webber eds., *International and EU Aviation Law*, Kluwer Law International, 2011.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, 2014.
- I. H. PH. DIEDERIKS – VERSCHOOR, *AN INTRODUCTION TO AIR LAW*, 8th eds., Kluwer Law International, 2006).
- International Civil Aviation Organization, *Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation: Air Traffic Services*, 13th ed., International Civil Aviation Organization, 2001.
- International Civil Aviation Organization, *Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Information Services*, 15th ed., International Civil Aviation Organization, 2016.
- International Civil Aviation Organization, *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation: Rules of the Air*, 10th ed., International Civil Aviation Organization, 2005.
- International Civil Aviation Organization, *Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Charts*, 11th ed., International Civil Aviation Organization, 2009.
- International Civil Aviation Organization, *Civil / Military Cooperation in Air Traffic Management*, International Civil Aviation Organization, 2011.
- James Kraska, *Maritime Power and the Law of the Sea*, Oxford University Press, 2011.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th eds., Cambridge University Press, 2008.

- Martin van Creveld, *War in 100 Events*, The History Press, 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 2nd eds., PT. Alumni, 2015.
- National Commission on Terrorist Attack Upon the United States, *The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, (Cosimo Reports, New York, 2010).
- Paul Stephen Dempsey, *Public International Air Law*, McGill University, 2008.
- R. R. Churchill dan A. V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3rd eds., Manchester University Press, 1999.
- Robert Cribb dan Michelle Ford eds., *Indonesia's Maritime Boundaries dalam INDONESIA BEYOND THE WATER'S EDGE: MANAGING AN ARCHIPELAGIC STATE*, Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Ruwantissa Abeyratne, *Air Navigation Law*, Springer, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Thomas W. Zeiler dan Daniel M. DuBois, *A Companion to World War II: Volume I*, Wiley-Blackwell, 2013.
- Tom Ruys, 'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice, Cambridge University Press, 2010.
- Tristram Pascal Moeliono, John Lumbantobing, Niken Prawesti, & Adrianus A. V. Ramon, *Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Indonesia*, Unpar Press, 2018.
- William Stueck, *The Korean War: An International History*, Princeton University Press, 1995.
- Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea* 3rd eds., Cambridge University Press, 2019.

Jurnal

- Andi Yudhistira, *Over the Horizon Radar (OTHR) untuk Menjaga Wilayah Udara dan Laut Indonesia*, *Jurnal Pertahanan*, 5, 2015.
- Bart Elias dan Ian E. Rinehars, *China's Air Defense Identification Zone (ADIZ)* CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 2015.

- Christopher Lamont, *Conflict in the Skies: The Law of Air Defense Identification Zones*, *Air & Space Law*, 39, 2014.
- Danang Risdiarto, *Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, 2019.
- Danang Risdiarto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal*, *Jurnal Rechts Vinding*, 5, 2016.
- Elizabeth Cuadra, *Air Defense Identification Zone: Creeping Jurisdiction in the Airspace*, *Virginia Journal of International Law*, 18, 1978.
- Endang Puji Lestari, *The Delegation of State Sovereignty over Air Space in the Implementation of Air Navigation: The Analysis of the Agreement between Indonesia and Singapore on Management of the Batam and Natuna Flight Information Region*, *Fiat Justisia*, 11, 2017.
- Harry Purwanto dan Levina Yustitianiingtyas, *The Establishment of an Air Defense Identification Zone as an Opportunity in Enforcing the Sovereignty of the State and Law in Indonesia*, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 85, 2019.
- Jae Woon Lee dan Xiongfeng Li, *Ongoing Tension in the Air: The Need for ICJ's Advisory Opinion on Air Defense Identification Zones (ADIZ)*, *Korean Journal of International and Comparative Law*, 6, 2018.
- Jae Woon Lee, *Tension on the Air: The Air Defense Identification Zone on the East China Sea*, *Journal of East Asia and International Law*, 7, 2014.
- Jinyuan Su, *The Practice of States on Air Defense Identification Zones: Geographical Scope, Object of Identification, and Identification Measures*, *Chinese Journal of International Law*, 18, 2019.
- Jonathan G. Odom, *A Rules-Based Approach to Airspace Defense: A U.S. Perspective on the International Law of the Sea and Airspace, Air Defense Measures, and the Freedom of Navigation*, *Revue Belge de Droit International / Belgian Review of International Law*, 47, 2014.
- Kay Hailbronner, *Freedom of the Air and the Convention on the Law of the Sea*, *American Journal of International Law*, 77, 1983.

- Li Juqian, *Air Defense Identification Zone: The Restriction on the Free Sky Due To the Residual Rights Principle*, 2 Chinese Legal Science, 2015.
- M. Miftahul Ghufron, Ari Ganjar Herdiansyah, dan Nuraeni, *Air Power Development Strategy to Maintain Indonesian National Security as the World Maritime Axis: A Study on the Air Territory of the National Air Defense Command Sector I*, Central European Journal of International & Security Studies, 12, 2018.
- Marsono dan Deni D.A.R, *Determination of Air Defense Identification Zone (ADIZ) in Order to Support Sovereignty of National Air Region*, Journal of Defense & State Defense, 8, 2018.
- Pai Zheng, *Justification and Limits of ADIZs Under Public International Law*, Issues in Aviation and Policy, 14, 2015.
- Peter A. Dutton, *Caelum Liberum: Air Defense Identification Zones Outside Sovereign Airspace*, 103 American Journal of International Law, 2009.
- Ridha Aditya Nugraha et al., *The New Plan on Indonesian Air Defense Identification Zone*, The Aviation & Space Journal, 19, 2020.
- Rohannisa Naja Rachma Savitri dan Adya Paramita Prabandari, *TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2, 2020.
- Su Jinyuan, *The East China Sea Air Defense Identification Zone and International Law*, Chinese Journal of International Law, 14, 2015.
- Zoltan Papp, *Air Defense Identification Zone (ADIZ) in the Light of Public International Law*, Pecs Journal of International and European Law, 2, 2015.

Situs Internet

- Abraham Utama, *Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Meningkatkan Tajam*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151208141245-20-96791/pelanggaran-wilayah-udara-indonesia-meningkat-tajam>.
- AirNav Indonesia, *Layanan: Ruang Udara*, <https://www.airnavindonesia.co.id/ruang/udara>.
- Airspace Review, *“Nyelonong” Tak Berizin ke Wilayah Udara Indonesia, F-16 TNI AU Paksa B777 Ethiopia Mendarat di Batam*, <https://www.airspace->

[review.com/2019/01/14/nyelonong-tak-berizin-ke-wilayah-udara-indonesia-f-16-tni-au-paksa-b777-ethiopia-mendarat-di-batam/](https://www.review.com/2019/01/14/nyelonong-tak-berizin-ke-wilayah-udara-indonesia-f-16-tni-au-paksa-b777-ethiopia-mendarat-di-batam/).

AIS Center – AirNav Indonesia, *Nav-Earth*,
<https://pia.airnavindonesia.co.id/navearth/>.

Allan R. Millett, *Korean War: 1950 – 1953*,
<https://www.britannica.com/event/Korean-War>.

Argianto, *Terungkap! Ternyata Inilah Alasan Ethiopian Airlines Tak Urus Izin Sebelum Lintasi Langit Batam*,
<https://batam.tribunnews.com/2019/01/18/terungkap-ternyata-inilah-alasan-ethiopian-airlines-tak-urus-izin-sebelum-lintasi-langit-batam>.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), *Grand Design: Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011 – 2025*,
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164742-\[_Konten_\]Konten%20D1528.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164742-[_Konten_]Konten%20D1528.pdf).

BBC News, *What's Behind the China-Taiwan Divide?*,
<https://www.bbc.com/news/world-asia-34729538>.

China Daily, *Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone of the People's Republic of China*,
https://www.chinadaily.com.cn/china/2013-11/23/content_17126618.htm.

Constantin Melnik, *Insurgency and Counterinsurgency in Algeria*,
<https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/documents/2006/D10671-1.pdf>.

Council on Foreign Relations, *Territorial Disputes in the South China Sea*,
<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>.

Encyclopaedia Britannica Editors, *Cold War*, e-resources.perpusnas.go.id:2371/levels/adults/article/Cold-War/24721.

Evan Laksmana, *Is An Indonesian Air Defense Identification Zone Forthcoming?*,
<https://amti.csis.org/indonesian-adiz-forthcoming/>.

Federation of American Scientists, *Over the Line: Implication of China's ADIZ Intrusion in Northeast Asia*,
<https://fas.org/wp-content/uploads/2020/08/ADIZ-Report.pdf>.

Frederic Lasserre, *Russian Air Patrols in the Arctic: Are Long-Range Bomber Patrols a Challenge to Canadian Security and Sovereignty?*, https://www.researchgate.net/figure/Location-of-Russian-strategic-airbases-and-routes-of-bomber-patrols_fig3_309605658.

Global Security, *Air Defense Identification Zone*, <https://www.globalsecurity.org/military/world/japan/adiz.htm>.

Global Security, *Identification Friend or Foe*, <https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/iff.htm>.

Global Security, *ROK Air Defense Identification Zone (KADIZ)*, <https://www.globalsecurity.org/military/world/rok/adiz.htm>.

Google Maps, *Data Peta*, <https://www.google.com/maps/@16.6685173,128.0251506,2z>.

Hankyoreh, *The History of Air Defense Identification Zones in Northeast Asia*, http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/612953.html.

History Editors, *Germany Conducts First Successful V-2 Rocket*, <https://www.history.com/this-day-in-history/germany-conducts-first-successful-v-2-rocket-test>.

History Editors, *World War II*, https://www.history.com/topics/world-war-ii/world-war-ii-history#section_7.

History, *Cuban Missile Crisis*, <https://www.history.com/topics/cold-war/cuban-missile-crisis>.

History, *September 11 Attacks*, <https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>.

Indah Mutiara Kami, *Lintasi Indonesia Tanpa Izin, Pesawat Ethiopia Ngaku Mau ke Singapura*, <https://news.detik.com/berita/d-4385115/lintasi-indonesia-tanpa-izin-pesawat-ethiopia-ngaku-mau-ke-singapura>.

International Flight Information Service Association, *Indonesia*, <https://ifisa.info/indonesia/>.

Japan Today, *Russian, Chinese Bombers Fly Joint Patrol Over Sea of Japan and East China Sea*, <https://japantoday.com/category/politics/russian-and-chinese-bombers-fly-joint-patrol-over-pacific>.

- John Graham Royde-Smith, *World War II*,
<https://www.britannica.com/event/World-War-II>.
- Josh Smith, *Explainer: Competing Claims Make Northeast Asian Sea a Flashpoint*,
<https://www.reuters.com/article/us-southkorea-russia-aircraft-explainer-idUSKCN1UK0NO>.
- Keith Sutton, et al., Algeria, <https://www.britannica.com/place/Algeria>.
- Kompas, *5 Fakta F-16 “Taklukan” Pesawat Ethiopian Airlines, Langgar Wilayah NKRI Hingga Butuh 20 Menit*,
<https://regional.kompas.com/read/2019/01/15/16425501/5-fakta-f-16-taklukan-pesawat-ethiopian-airlines-langgar-wilayah-nkri-hingga?page=all>.
- Kompas, *Ethiopian Airlines Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Kantongi FC*,
<https://regional.kompas.com/read/2019/01/14/16455781/ethiopian-airlines-masuk-wilayah-indonesia-tanpa-kantongi-fc>.
- Kompas, *Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional*,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/14574831/sepanjang-2018-tni-au-catat-ada-127-kasus-pelanggaran-wilayah-udara-nasional>.
- Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), *History*,
https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php.
- Nicholas Grief, *The Legal Principles Governing the Control of National Airspace and Flight Information Regions and Their Application to the Eastern Mediterranean*,
<https://erpac.org/wp-content/uploads/2017/02/the-legal-principles-governing-the-control-of-national-airspace-and-flight-information-regions-and-their-application-to-the-eastern-mediterranean-2009.pdf>.
- North American Aerospace Defense Command, *About NORAD*,
<https://www.norad.mil/About-NORAD/>.
- Office of the Historian, *Occupation and Reconstruction of Japan 1945-52*,
<https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-reconstruction>.
- PT. Indoavis Nusantara, *Singapore FIR*,
<http://www.indoavis.co.id/main/index.php>.

- PT. Indoavis Nusantara, *WI(D)-12 Air Defense Identification Zone (ADIZ)*, <http://www.indoavis.co.id/main/search.php?rSearch=AIRSPC&tKeyword=WI%28D%29-12+AIR+DEFENCE+IDENTIFICATION+ZONE+%28ADIZ%29>.
- Robert Kangas, *Cold War*, <https://doi.org/10.1002/9781444338232.wbeow128>.
- Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, *Bela RI di Natuna, AS Anggap Klaim China di LCS Illegal*, <http://setnas-asean.id/en/news/read/bela-ri-di-natuna-as-anggap-klaim-china-di-lcs-ilegal>.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica, *Algerian War*, <https://www.britannica.com/event/Algerian-War>.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica, *Occupation of Japan: Japanese History (1945 – 1952)*, <https://www.britannica.com/event/occupation-of-japan>.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica, *V-2 Missile: Military Technology*, <https://www.britannica.com/technology/V-2-missile>.
- The Fletcher School – Tufts University, *Maritime Zone*, <https://sites.tufts.edu/lawofthesea/chapter-two/>.

Sumber Hukum Primer

- Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 2009, Penerbangan, L.N.R.I Tahun 2009 No. 1.
- Peraturan Pemerintah R.I., No. 4 Tahun 2018, Pengamanan Wilayah Udara, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 12.
- Keputusan Presiden R.I., No. 7 Tahun 1996, Pengesahan *Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*, L.N.R.I., 1996 No. 7.
- Peraturan Menteri Perhubungan R.I., No. PM 109 Tahun 2016, Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, B.N.R.I., Tahun 2016 No. 1378.

Charter of the United Nations, Art. 51, October 24, 1945, 1 U.N.T.S. XVI.
Chicago Convention on International Civil Aviation, December 7 1944, 15 U.N.T.S. 295.
North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark & Federal Republic of Germany v. Netherlands) 1969 I.C.J. 44 (February 20).
Protocol Relating to Amendment to the Convention on International Civil Aviation, Article 3 bis, 10 May 1984.
United Nations Convention on the Law of the Sea, December 10 1982, 3 U.N.T.S. 1833.

Dokumen Organisasi Internasional

Legal Committee International Civil Aviation Organization, Working Paper, *Secretariat Study: United Nations Convention on the Law of the Sea – Implications, if any, for the application of Chicago Convention, Its Annexes and Other International Air Law Instruments*, LC/29-WP/8-1, October 3, 1994.
International Civil Aviation Organization (ICAO), *Worldwide Air Transport Conference: Airspace Sovereignty (presented by the Civil Air Navigation Services Organization)*, ATConf/6-WP/80.

Peraturan Negara Asing

Aeronautics and Space Parts 60 to 109, 14 C.F.R. § 99.3 (2011).
Aeronautics and Space Parts 60 to 109, 14 C.F.R. § 99.43 (2011).
Aeronautics and Space Parts 60 to 109, 14 C.F.R. § 99.45 (2011).
Aeronautics and Space Parts 60 to 109, 14 C.F.R. § 99.47 (2011).
Aeronautics and Space Parts 60 to 109, 14 C.F.R. § 99.49 (2011).
Canadian Aviation Regulations, SOR/2020-96-433, § 600.01.
Department of National Defence, *Designated Airspace Handbook*, Nav Canada, 2020.
U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration, *Aeronautical Information Manual: Official Guide to Basic Flight Information and ATC Procedures* FAA, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Nova Maulani, *Foreign Service Officer* Direktorat Hukum Perjanjian dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (25 November 2020).

Wawancara dengan Nova Maulani, *Foreign Service Officer* Direktorat Hukum Perjanjian dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (4 Desember 2020).

Wawancara dengan Nova Maulani, *Foreign Service Officer* Direktorat Hukum Perjanjian dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (23 Desember 2020).

